
ANALISIS KONTRIBUSI SUB SEKTOR DALAM MENETUKAN KOMODITI UNGGULAN EKONOMI KABUPATEN DHARMASRAYA

Weriantoni^{1*}, Tetra Nanda Lovandi²

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Andalas, E-mail
weriantoni@eb.unand.ac.id, tetralovandi23@gmail.com

Abstract

The leading economic sector is a sector that can accelerate and support regional economic growth and development based on the ability of the sector by taking into account the level of criteria in contributing to regional GRDP revenues. The leading sector as the main sector that is very important in the economic development of a region does not only discuss geographical location but also spreads to a sector in various kinds of economic activities, making it a driving factor for the economy as a whole. secondary data obtained from publications issued by government agencies such as the agency authorized to manage resources in accordance with the main tasks and functions of the contribution of the sub-sector. The method used in this research is the measurement of regional economic structure can be done by calculating each sector calculated, to determine the contribution of each sub-sector of the economic commodity owned by each sector to the total potential of the related commodity

Keywords: *Leading sector, agricultural sector, mining and quarrying sector, government administration sector, defense and social security, construction sector, information and communication sector.*

Abstrak

Sektor ekonomi unggulan menjadi sektor yang bisa mempercepat dan menunjang pertumbuhan dan pembangunan perekonomian daerah yang berdasarkan pada kemampuan sektor dengan memperhatikan tingkat kriteria dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan PDRB daerah. Sektor unggulan sebagai sektor utama yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya membahas mengenai lokasi secara geografis saja melainkan menyebar pada suatu sektor dalam berbagai macam kegiatan ekonomi menjadikan faktor penggerak ekonomi secara keseluruhan. data sekunder yang diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan oleh Instansi-instansi pemerintah seperti dinas yang berwenang mengelola sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kontribusi sub sektor. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengukuran struktur ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung masing-masing sektor dihitung, untuk mengetahui kontribusi masing-masing subsektor dari komoditi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing sektor terhadap total keseluruhan potensi komoditi terkait.

Kata Kunci : *Sektor unggulan, sektor pertanian, sektor sektor pertambangan dan penggalian, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi.*

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai macam wilayah dari sabang sampai merauke dengan struktur perekonomian beraneka ragam memiliki peran atau kontribusi dari masing-masing sektor dalam struktur perekonomian. Jika peran atau kontribusi terjadi penurunan di seluruh wilayah bukan berarti sektor primer di wilayah tersebut nilai tambahnya menurun. Pada kenyataannya nilai tambah selalu meningkat, namun pertumbuhan nilai tambah pada sektor lainnya juga naik lebih tinggi. Perubahan struktur ekonomi di wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki wilayah itu ialah sumber-sumber yang tersedia (Adi, 2001).

Ditetapkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, sehingga sistem otonomi daerah menjadi posisi sistem sentralistik. Dengan kondisi itu, menjadikan

masing-masing daerah sudah sangat bebas dengan menetapkan komoditi/sektor pengembangannya yang diprioritaskan. Pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan untuk melihat sektor yang mempunyai keunggulan maupun kelemahan wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor dengan keunggulannya, memiliki potensi dan prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dan diharapkan mampu mendorong sektor lainnya dapat berkembang kedepannya (Tarigan, 2005).

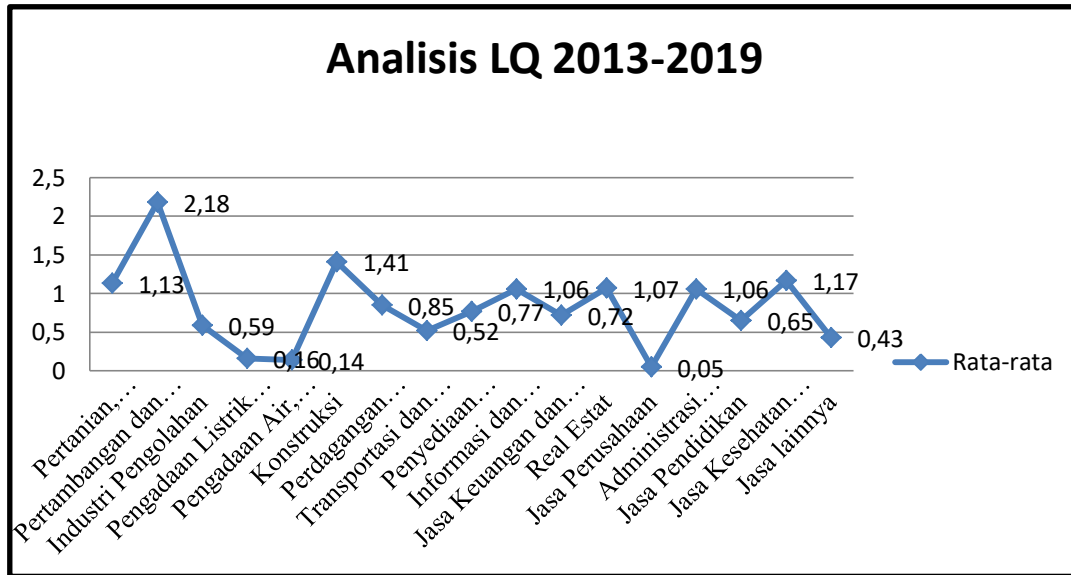
Kebijakan pembangunan tersebut didasarkan pada perincian masing-masing daerah (*endogenous development*) dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia lapangan (*regional*), kelembagaan dan sumber daya fisik. Dalam mencapai tujuan mereka, masyarakat dan pemerintah memiliki persepsi yang sama bahwa mereka mengambil inisiatif bersama untuk pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah mengevaluasi sektor-sektor kunci yang memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada dan mendukung pembangunan ekonomi daerah (Arsyad, 2010).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan juga dengan hasil kegiatan sektor-sektor kegiatan usaha Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuatu daerah dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh bruto seluruh barang dan jasa di wilayah domestik suatu negara. Pengembangan potensi perekonomian masyarakat daerah dari sektor unggulan dapat menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan prioritas kebijakan yang dilakukan (Rini, 2006).

Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/sijunjung pada tahun 2004 diresmikan secara simbolik oleh presiden RI pada tanggal 7 januari di Istana negara. Berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 menjelaskan tentang pembentukan pemekaran daerah serentak di Provinsi Sumatera Barat diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004 Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman barat, dan Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Dharmasraya terletak pada ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan berbatasan langsung wilayah antara Provinsi Jambi dan Riau. Sehingga memiliki potensi distribusi hasil produksi dan pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah sekitar (RPJPD Kabupaten Dharmasraya, 2005-2025).

Perbedaan kontribusi nilai tiap sektor yang membentuk PDRB Dharmasraya merupakan fenomena yang dapat ditelusuri kembali pada kondisi yang berbeda dari tiap daerah. Dalam kaitannya dengan semua sektor dan subsektor perekonomian, timbul pertanyaan apakah kontribusi sektoral yang muncul didasarkan pada strategi kebijakan pembangunan yang tepat dan terstruktur. Sehingga, untuk dapat berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah dan akibatnya sumber daya manusia yang terbatas, kita perlu fokus pada pembangunan sektor dan sub sektor, yang memiliki sinergi besar untuk sektor lain dan perekonomian secara keseluruhan.

Grafik 1. Analisis LQ 2013-2019



Sumber: Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Dharmasraya, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat hasil dari perhitungan analisis LQ (*location quotient*) sektor basis atau hasil sektor mencapai angka lebih dari satu, hasil sektor basis tersebut adalah 7 sektor mendominasi dalam pembentukan pertumbuhan PDRB dimana sektor tersebut terdiri dari, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Real Estat, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial (Weriantoni dkk, 2021).

Namun, fenomena yang terjadi selama ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi banyak permasalahan, kendala dan tantangan pembangunan dalam pengembangan perekonomian daerah, karena kemungkinan-kemungkinan yang ada belum dikelola secara optimal. Dimana masing-masing daerah belum mengetahui perkembangan daerah akan potensi yang dimilikinya. (RPJPD Pemerintahan Dharmasraya, 2005-2025).

Mengetahui sub sektor unggulan dari sektor potensial LQ (*location quotient*) yang menjadikan Kabupaten Dharmasraya dapat mempengaruhi arah pembangunan ke depan. Sehingga, untuk kedepannya rencana pembangunan daerah akan digunakan secara lebih terarah sebagai dasar pelaksanaan prioritas untuk memanfaatkan secara optimal potensi ekonomi daerah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun data yang cukup terbatas peneliti berfokus 5 sektor basis untuk menentukan kontribusi sub sektor menjadi komoditi sektoral unggulan dalam pembentukan pertumbuhan perekonomian, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta sektor informasi dan komunikasi.

LANDASAN TEORI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Sukino (1996) dan Muta'alli (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah **suatu** proses peningkatan output perkapita mengalami kenaikan terus menerus dalam jangka waktu yang

panjang. Sehingga, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan dalam pencapaian pembangunan ekonomi.

Menurut Muta'alli (2015) menyebutkan bahwa terapat dua perhitungan, yaitu PDB (Produk Dmestik Bruto) dan tingkat pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto) dan untuk melihat tingkat dalam wilayah daerah atau regional mnggunakan perhitungan PDRB (Produk Domestik Bruto). Sehingga pertumbuhan ekonomi pada umumnya diartikan sebagai kenaikan pertumbuhan PDB rill perkapita dimana PDB tersebut merupakan nilai pasar keluaran total sebuah negara dimana nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi terhadap periode tertentu. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk dasar pembuatan proyeksi dalam perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan suatu negara atau daerah tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi juga dapat mengukur kemajuan peningkatan pembangunan ekonomi sebagai hasil dari pendapatan perkapita yang digunakan dalam mengukur tingkat kemakmuran wilayah.

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana suatu pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola maupun mengembangkan sumber daya yang ada serta membangun suatu pola kemitraan kerja sama antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta sehingga dapat membentuk suatu lapangan kerja bagi masyarakat luas dan memacu perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2010).

Perkembangan perekonomian daerah dapat terlaksana dengan baik karena peningkatan pendapatan maupun produktivitas daerah terhadap aktivitas perekonomian yang sudah ada (*intensifikasi*). Tidak hanya itu, dapat pula terjadi karena peningkatan pendapatan dan produktivitas sebagai akibat adanya kegiatan usaha baru dan juga terjadi apabila ada perkembangan secara keseluruhan. Dengan kondisi ekonomi tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah ataupun pemerintah dapat menjalankan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah (Suparmoko, 2001).

PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah yang didapatkan untuk seluruh jenis usaha dan jasa dalam suatu daerah, dengan memperhatikan jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh seluruh sektor ekonomi. Sehingga indikator yang paling penting dari kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara ialah melalui pencapaian tingkat PDRB dalam daerah setiap tahun (Boediono, 1999)

Terdapat tiga pendekatan penyusun PDRB yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang terdapat atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku yang dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan atas harga yang berlaku pada periode selanjutnya, dengan tujuan dapat melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan harga pada tahun dasar dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (PDRB Kabupaten Dharmasraya 2013-2017)

SEKTOR PEREKONOMIAN

Sektor perekonomian dapat dijelaskan sebagai klasifikasi peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, berdasarkan lapangan usaha maupun klasifikasi sektoral dalam jenis output dan aktivitasnya dalam berbagai sektor, terdapat pengklasifikasian sektor paling umum hingga sangat rinci, terdapat tiga sektor yang paling umum atau proses pembangunan ekonomi menyebabkan

adanya perubahan struktural pada sektor perekonomian, tahap-tahap transformasi tersebut adalah (Yuliadi, 2000):

Tahap I atau sektor primer, merupakan sektor perekonomian kegiatannya meliputi kegiatan yang outputnya masih dari proses tingkat dasar. Dilihat dominannya aktivitas sektor primer terutama produksi sektor pertanian yang pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan sektor industri. Serta dilihat dari sisi penawaran terdapat rendahnya akumulasi kapital, tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja maupun rendahnya pertumbuhan produktivitas oleh faktor-faktor produksi. Yang termasuk sektor primer adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian

Tahap II atau sektor sekunder, merupakan sektor perekonomian kegiatannya sebagian besar inputnya berasal dari olahan sektor primer. Atau disebut juga sektor industrialisasi ditunjukkan adanya pergeseran pusat pertumbuhan dari sektor primer ke sektor sekunder. Sehingga, indikator utama ditunjukkan adanya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi, yang termasuk sektor sekunder adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan uap serta sektor konstruksi.

Tahap III atau sektor tersier, merupakan sektor perekonomian kegiatannya menghasilkan komoditas jasa. Yang termasuk sektor tersier adalah sektor perdagangan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor pengangkutan dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor aktivitas keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial.

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Pada dasarnya sektor pertambangan dan penggalian merupakan segala kegiatan mencakup barang tambang, mineral, dan barang-barang galian lainnya. naik berbentuk padat, cair maupun gas yang didapatkan di permukaan bumi maupun di dalam bumi. Sektor pertambangan juga tidak kalah menjadi sektor andalan bagi perekonomian Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. (Nur Wahyuningtyas, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) menjelaskan pertambangan dan penggalian adalah segala bentuk tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, pengusahaan dan penelitian mineral dan batu bara meliputi eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi dan pertambangan, pengelolaan dan permunian, serta kegiatan pasca tambang.

SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL

Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial, kegiatan ini bersifat pemerintahan, dengan golongan ini mencakup sub sektor terdapat: administrasi pemerintahan, mencakup perundang-undangan kebijakan ekonomi nasional, hubungan luar negeri pertahanan, keamanan negara, jaminan sosial wajib, kegiatan legislatif, pelayanan imigrasi dan administrasi program pemerintahan untuk ruang lingkup daerah Realisasi APBD. (Produk Domestik Regional Bruto Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha 2014-2018).

SEKTOR KONSTRUKSI

Industri jasa konstruksi adalah salah satu sektor industri yang mempunyai tempat yang sangat strategis pada sistem ekonomi nasional. Nilai strategisnya terdapat keterkaitan antara sektor pada rantai pemasok (peralatan, bahan baku, dan bahan baku) serta hasil produksinya yang berfungsi pada

sarana dan prasarana bagi tenaga kerja sektor lainnya (Sidarto,2007). Selain itu, jasa konstruksi dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha industrinya bisa memberikan peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja yang besar (Purwanto,2010)

SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dalam konteks dunia usaha, perkembangan teknologi informatika dalam wujud intrnet memberikan dampak perubahan pesat yang menghasilkan paradigma baru pada dunia bisnis pemerintahan maupun swasta dalam pemasaran digital (*digital marketing*) pada tahun sekarang ini, dapat diprediksi layanan aplikasi berbasis IoT terus berkembang dan semakin populer. Dan juga penerapan *electronic commerce (e-commerce)* yaitu pada awal 1970-an dilihat adanya inovasi seperti transfer dana secara elektronik. (Abdurrahim, 2011)

METODE PENELITIAN

Data dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya menjadi data primer dan data sekunder. Dimana, data primer adalah data yang didapatkan dan diperoleh dari peneliti secara langsung berasal dari sumber data. Sehingga data itu biasanya didapatkan langsung survei lapangan yang menggunakan semua metode pengambilan data orisinal. Menggunakan berbagai macam teknik dalam mengumpulkan data primer seperti, observasi, wawancara, diskusi, ataupun penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan telah dikeluarkan publikasi kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi yang dikeluarkan oleh Instansi-instansi pemerintah seperti dinas yang berwenang mengelola sumber daya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari beberapa sub sektor dari kontribusi sektoral tersebut.

Sumber dari data penelitian diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya, dan sumber dari situs resmi publikasi indikator sub sektor dari sumber Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya, Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, laporan hasil penelitian, publikasi ilmiah lainnya, terbitan dan arsip-arsip lembaga/instansi terkait lainnya.

Metode analisis yang digunakan adalah untuk mengetahui kontribusi masing-masing subsektor dari komoditi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing sektor terhadap total keseluruhan potensi komoditi terkait yang ada Di Kabupaten Dharmasraya. Pengukuran struktur ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung masing-masing sektor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sjafrizal,2008) :

$$\text{Kontribusi komoditi } i = \frac{\text{Nilai komoditi } i \text{ tahun } (n)}{\text{Jumlah total seluruh komoditi tahun } (n)} \times 100$$

Sehingga, untuk mendapatkan nilai rata-rata kontribusi komoditi dalam beberapa tahun dapat digunakan rumus:

$$\text{Rata - rata} = \frac{\sum X}{N}$$

Rata-rata = Nilai rata-rata kontribusi komoditi i

$\sum X$ = Jumlah seluruh nilai kontribusi tahun awal sampai tahun akhir

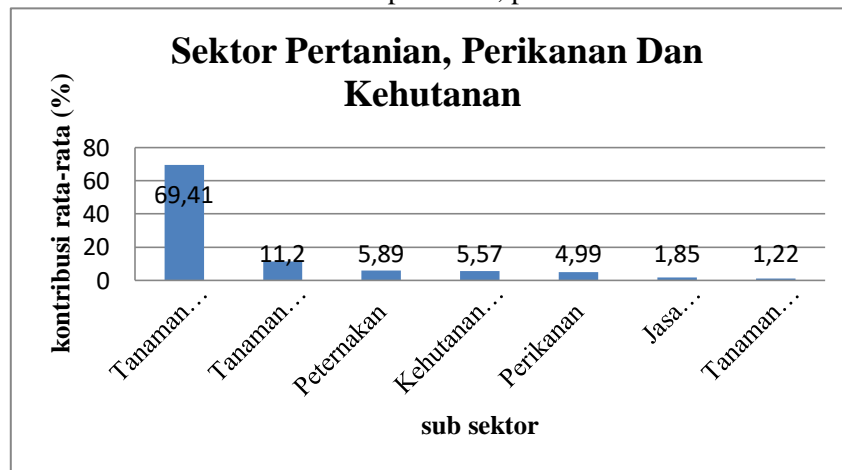
N = Jumlah data (tahun)

Tujuan metode ini adalah mengukur dan mengetahui serta menganalisis potensi komoditi yang dimiliki oleh Sub sektor di Kabupaten Dharmasraya. Sub sektor tersebut dapat dijadikan sebagai pusat/sentral suatu kegiatan usaha, sehingga dapat diketahui bahwa semakin besar nilai total perolehan poin yang diperoleh suatu Sub sektor pada kelompok sektor tertentu maka semakin besar peluang sub sektor itu untuk dilakukan pengembangan terhadap komoditi potensial yang dimilikinya.

TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Hasil Analisis kontribusi Sub Sektor dari Sektor Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

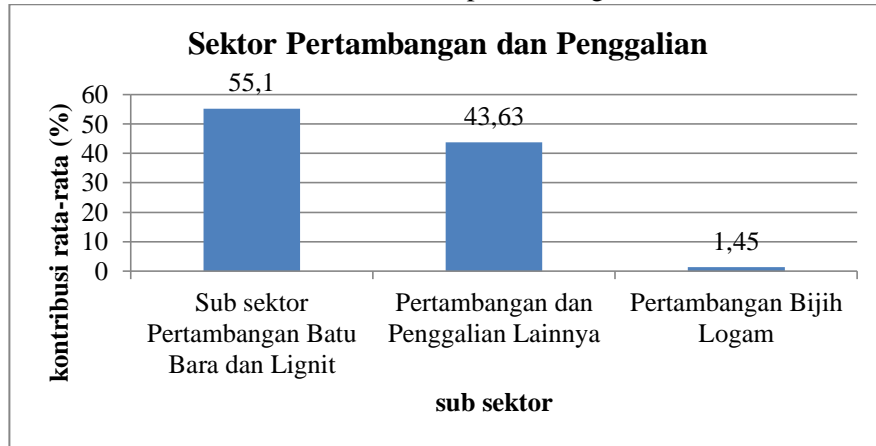
Grafik 2 Sektor dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan



Dapat diketahui bahwa Sub sektor dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, serta perikanan Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2011-2018 sub sektor tanaman perkebunan menapatkan hasil nilai kontribusi rata-rata paling tinggi dengan nilai rata-rata mencapai 69,41% dengan tingkat potensial nomor 1 (satu), dan sub sektor dengan kontribusi rata-rata paling rendah oleh sub sektor tanaman hortikultura nilai rata-rata 1,22% dengan tingkat potensial terakhir dengan tingkat potensial nomor 7 (tujuh) dari total seluruh sub sektor, sehingga dapat diartikan bahwa sub sektor tanaman perkebunan dengan kontribusi nilai rata-rata tertinggi dan menjadi komoditi unggulan dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Dilihat dari subsektor perkebunan sebagai sub sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB terutama atas harga konstan berdasarkan lapangan usaha, sehingga terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang sedang dan telah dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat dan dapat menampung banyak tenaga kerja masyarakat sekitar. Dimana terdapat 3 (tiga) komoditi tersebut adalah sawit, karet dan coklat/kakao

2. Sektor Pertambangan Dan Penggalian

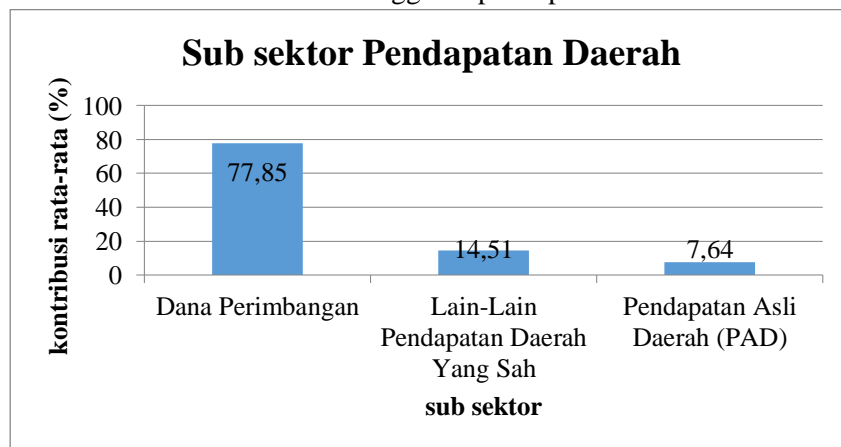
Grafik 3. Sektor pertambangan



Dapat diketahui bahwa sub sektor dari sektor pertambangan dan penggalian yang terdiri dari sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam serta pertambangan dan penggalian lainnya Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2011-2018 subsektor pertambangan dan penggalian lainnya mendapatkan hasil nilai kontribusi rata-rata paling tinggi dengan nilai rata-rata mencapai 55,1% dengan tingkat potensial pertama sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, diikuti sub sektor pertambangan dan penggalian lainnya diposisi kedua dengan nilai total kontribusi rata-rata 43,63% serta sub sektor dengan kontribusi rata-rata paling rendah oleh sub sektor pertambangan biji logam nilai rata-rata 1,45%, sehingga dapat diartikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian didominasi komoditas unggulan dengan kontribusi nilai rata-rata tertinggi yaitu dari sub sektor pertambangan batu bara dan penggalian lainnya.

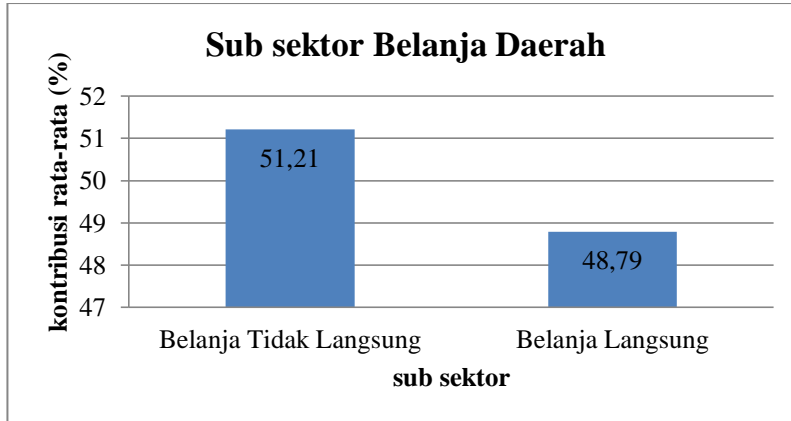
3. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib

Grafik 4. sektor anggaran pendapatan daerah



Terdapat hasil kontribusi rata-rata sektor anggaran pendapatan daerah, terdiri dari sub sektor dana perimbangan dengan nilai rata-rata 77,85%, diikuti posisi kedua sub sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata kontribusi 14,51%, serta diposisi terakhir terdapat sub sektor Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan kontribusi rata-rata 7,64%. Sehingga dapat diketahui bahwa sub sektor dana perimbangan menjadi kontribusi nilai rata-rata tertinggi dan menjadi komoditi unggulan dari sektor Anggaran pendapatan daerah.

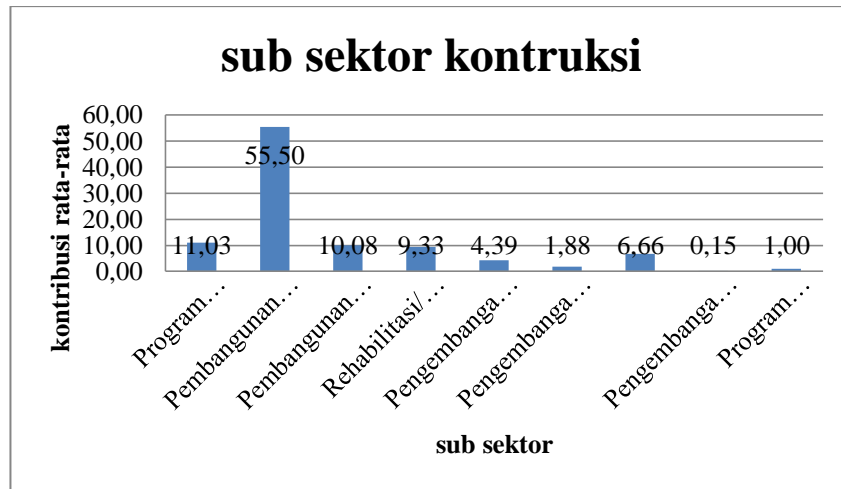
Grafik 5. Sektor belanja daerah



Terdapat hasil kontribusi rata-rata sektor belanja daerah, terdiri dari sub sektor belanja tidak langsung dengan nilai kontribusi rata-rata 51,21% dan belanja langsung dengan kontribusi rata-rata 48,79%. Sehingga dapat diketahui bahwa sub sektor belanja tidak langsung menjadi kontribusi nilai rata-rata tertinggi dan menjadi komoditi unggulan dari sektor belanja daerah.

4. Sektor Konstruksi

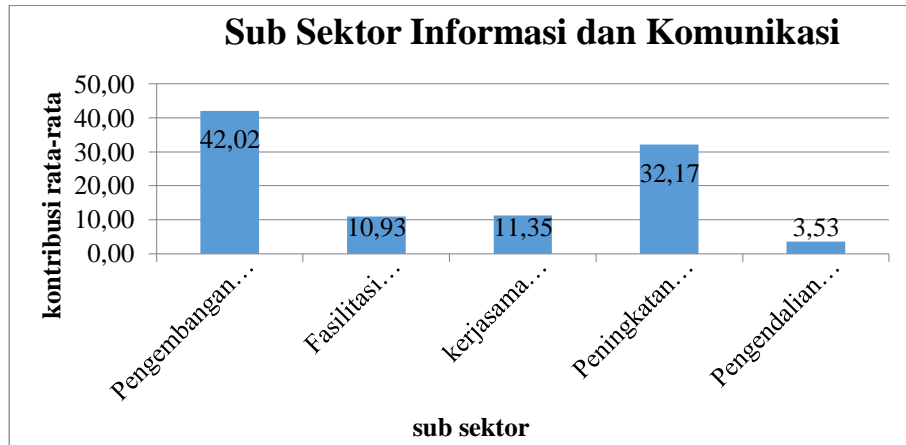
Grafik 6. Sektor konstruksi



Dapat diketahui bahwa Sub Sektor dari Sektor konstruksi yang terdiri dari sub sektor peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur perdesaan, Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dan Program pengendalian banjir. Dapat dilihat bahwa sub sektor pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 55,50%, dan nilai total kontribusi paling rendah oleh sub sektor pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya menempati posisi terakhir atau posisi ke 9 (sembilan) dengan nilai kontribusi rata-rata 0,15%. Sehingga dapat diketahui bahwa sub sektor pembangunan jalan dan jembatan menjadi kontribusi nilai rata-rata tertinggi dan menjadi komoditi unggulan dari sektor konstruksi.

5. Sektor Informasi dan Komunikasi

Grafik .7 Sektor Informasi dan Komunikasi



Dapat diketahui bahwa Sub Sektor dari Sektor informasi dan komunikasi yang terdiri dari 5 sub sektor Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, kerjasama informasi dan media massa, Peningkatan Kualitas Layanan Informasi, Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi. Dapat dilihat pada grafik diatas bahwa sub sektor Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 42,02%, dan nilai total kontribusi paling rendah oleh sub Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi menempati posisi terakhir atau posisi ke 5 (lima) dengan nilai kontribusi rata-rata 3,53%. Sehingga dapat diketahui bahwa sub sektor Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa menjadi kontribusi nilai rata-rata tertinggi dan menjadi komoditi unggulan dari sektor informasi dan komunikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang dilakukan dalam analisis kontribusi sub sektor dalam menentukan komoditi unggulan ekonomi Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan rumus kontribusi untuk menghitung masing-masing sub sektor pengukuran struktur ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung masing-masing sektor:

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sub Sektor dari Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, serta perikanan Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2011-2018, mendapatkan hasil sub sektor perkebunan sub sektor tanaman perkebunan menempatkan hasil nilai kontribusi rata-rata paling tinggi dengan nilai rata-rata mencapai 69,41% dari total keseluruhan sub sektor dengan tingkat potensial nomor 1 (satu), dimana komoditi sub sektor unggulan perkebunan terdiri dari tiga komoditi utama adalah sawit, karet dan coklat/kakao.

Selanjutnya sektor Pertambangan dan Penggalian yang terdiri dari sub sektor pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam serta pertambangan dan penggalian lainnya. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2011-2018, dapat disimpulkan bahwa subsektor pertambangan dan penggalian lainnya mendapatkan hasil nilai kontribusi rata-rata paling tinggi dengan nilai rata-rata mencapai

55,1% dari total keseluruhan sub sektor dengan tingkat potensial nomor 1 (satu), dimana komoditi sub sektor unggulan komoditi terdiri dari pertambangan batu bara dan pertambangan batu lignit,

Sektor Konstruksi dalam Rencana Program Prioritas Capaian Kinerja, Program Dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Dharmasraya, RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang terdiri dari 9 sub sektor peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase/ gorong – gorong, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur perdesaan, Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dan Program pengendalian banjir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sub sektor pembangunan jalan dan jembatan dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 55,50%, komoditi sub sektor unggulan dalam program pembangunan jalan dan jembatan dalam capaian program kinerja terdapat program prioritas antara lain, panjang jalan dengan kondisi mantap sekitar 787,8 Km, jalan dan jembatan yang dibangun serta banyak nya jembatan yang dibangun sekitar 118 unit proyeksi jembatan. Serta mega proyek jembatan kabel Sungai Dareh.

Pada ruang lingkup wilayah pemerintahan daerah menjelaskan Nilai Tambah Bruto (NTB) administrasi pemerintahan terdapat pada realisasi APBD, sehingga terdapat dua sektor yaitu sektor anggaran pendapatan daerah yaitu dari sektor anggaran pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya terdapat tiga sub sektor yaitu sub sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah, hasil kontribusi rata-rata sektor anggaran pendapatan daerah, dapat disimpulkan bahwa sub sektor dana perimbangan dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 77,85%, dengan tingkat potensial nomor 1 (satu), dimana komoditi sub sektor unggulan komoditi terdapat Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sektor Belanja Daerah Sub sektor dari sektor anggaran pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sub sektor belanja langsung dan belanja, dapat disimpulkan bahwa sub sektor tidak langsung belanja tidak langsung dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai kontribusi rata-rata 51,21%, dimana komoditi sub sektor unggulan komoditi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bunga, belanja bantuan keuangan kepadaprovinci/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik. Dengan komoditi belanja pegawai dengan kontribusi terbesar.

Sub Sektor dari Sektor informasi dan komunikasi yang terdiri dari 5 sub sektor Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, kerjasama informasi dan media massa, Peningkatan Kualitas Layanan Informasi, Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa sub sektor Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan nilai total kontribusi tertinggi menempati posisi pertama dengan nilai rata-rata 42,02%, dimana komoditi sub sektor unggulan komoditi pengembangan kualitas jaringan dan aplikasi pengembangan e – government.

SARAN

Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya lebih mengoptimalkan program dan kebijakan pembangunan dalam pengembangan sub sektor yang diarahkan untuk meningkatkan dan memajukan sektor-sektor ekonomi unggulan di daerah. Selain itu arah dan program kebijakan pemerintah juga perlu mempertimbangkan potensi ekonomi serta komoditi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing sub sektor. Tidak hanya itu, untuk sub sektor dalam tingkat sektor perekonomian

kontribusi yang rendah perlu diperhatikan lagi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian dengan cakupan lebih luas lagi mengenai analisis kontribusi sub sektor dalam menentukan komoditi unggulan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim (2011). *Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Pembelajaran Teknologi Informasi, Sekolah Pasca Sarjana*. UPI, Bandung
- Adi. I.R. (2001) *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat. Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan Ekonomi Daerah*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Muta'ali. L (2015). *Teknik Analisis regional untuk perencanaan wilayah, tata ruang dan lingkungan*. Yogyakarta: badan penerbit Fakultas Geografis
- Pemerintahan Daerah. *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun (2016) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Pemerintahan Daerah. *Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun (2016) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025*. Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Purwanto, (2010). *Peran Investor Asing Dalam Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia*. Jurnal ekonomi dan pembangunan, 18(1)
- Rini, (2006). *Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian 30 Provinsi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Safitri, A. I. (2019). *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Identifikasi Sektor Basis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah* Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.
- Santoso, A. A. F. (2011). *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1997-2009*.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarigan, Robinson (2005) *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Weriantoni, Dkk. (2021). *Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Kabupaten Dharmasraya*. Padang: LPPM Universitas Andalas.